



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARRY GUMELAR
2. Jabatan : KEPALA KANWIL
3. NHK : 83105

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 17.283.394.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/242 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/242 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 3.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/475 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 6.533.394.000
5. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 698.203.000**

1. MOBIL, JEEP WRANGLER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.203.000
3. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 214.000.000
4. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA REBEL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 538.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	9.030.057.782
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.910.237.671
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.805.000.000
Sub Total	Rp.	35.264.892.453
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	35.264.892.453

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.